



PERJANJIAN KERJA TAHUN 2026

Balai Teknik Perkeretaapian
Kelas II Palembang





**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026
BALAI TEKNIK PERKERETAAPIAN KELAS II PALEMBANG
DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **CHANDRAWAN ADHIPUTRANTO**
Jabatan : Kepala Balai Teknik Perkeretaapian Kelas II Palembang
Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

Nama : **ALLAN TANDIONO**
Jabatan : Direktur Jenderal Perkeretaapian
Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, Januari 2026

Pihak Kedua,

ALLAN TANDIONO
NIP 198801182025211023

Pihak Pertama,

CHANDRAWAN ADHIPUTRANTO
NIP 197108122005021001

KATA PENGANTAR

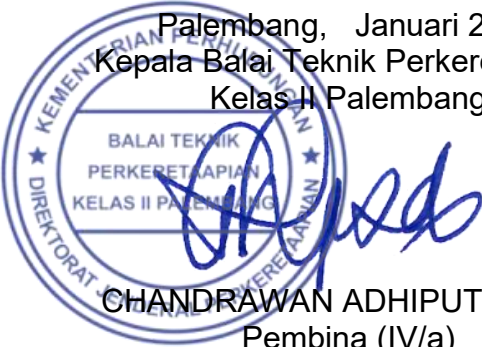
Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas limpahan rahmat, taufik, dan hidayah-Nya, dokumen Perjanjian Kinerja Balai Teknik Perkeretaapian Kelas II Palembang Tahun Anggaran 2026 dapat disusun dan diselesaikan dengan baik.

Perjanjian Kinerja Balai Teknik Perkeretaapian Kelas II Palembang Tahun 2026 merupakan penetapan terhadap rencana pencapaian sasaran dari program kerja Tahun 2026 yang juga merupakan suatu perjanjian kinerja atau kesepakatan kinerja antara Direktorat Jenderal Perkeretaapian dengan Balai Teknik Perkeretaapian Kelas II Palembang untuk mewujudkan target kinerja Tahun 2026 berdasarkan sumber daya yang dimiliki oleh Balai Teknik Perkeretaapian Kelas II Palembang.

Secara substansi, Perjanjian Kinerja Tahun Anggaran 2026 memuat rencana kinerja yang mencakup kegiatan di bidang pembangunan dan pengelolaan lalu lintas dan angkutan kereta api, pembangunan dan pengelolaan prasarana serta fasilitas pendukung kereta api, pembangunan dan pengelolaan sarana perkeretaapian, pembangunan dan pengelolaan keselamatan perkeretaapian, serta kegiatan dukungan manajemen dan dukungan teknis lainnya di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian.

Dokumen Perjanjian Kinerja ini semoga dapat menjadi pedoman pelaksanaan kegiatan yang lebih terarah, efisien, dan efektif, serta menjadi instrumen pengendalian dan evaluasi kinerja yang akuntabel. Dengan demikian, pelaksanaan program kerja Balai Teknik Perkeretaapian Kelas II Palembang diharapkan dapat berkontribusi nyata dalam mendukung terwujudnya sistem pemerintahan yang bersih, transparan, dan bertanggung jawab.

Palembang, Januari 2026
Kepala Balai Teknik Perkeretaapian
Kelas II Palembang



CHANDRAWAN ADHIPUTRANTO
Pembina (IV/a)
NIP 197108122005021001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	iv
DAFTAR GAMBAR	v
DAFTAR TABEL	vi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Maksud dan Tujuan	2
C. Kedudukan Tugas dan Fungsi	2
D. Struktur Organisasi	3
E. Sumber Daya Manusia	6
BAB II RENCANA STRATEGIS	9
A. Visi, Misi, dan Tujuan Direktorat Jenderal Perkeretaapian	9
B. Tujuan dan Sasaran	11
C. Program	12
BAB III RENCANA	13
A. Pengukuran Indikator Kinerja	13
B. Revisi Target Perjanjian Kinerja Balai Teknik Perkeretaapian Kelas II Palembang ..	21
C. Alokasi Anggaran Balai Teknik Perkeretaapian Kelas II Palembang Tahun 2026	26
BAB IV PENUTUP	30
LAMPIRAN	

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. 1 Struktur Organisasi Balai Teknik Perkeretaapian Kelas II Palembang	4
Gambar 1. 2 Jumlah Pegawai Berdasarkan Pendidikan	7
Gambar 1. 3 Jumlah Pegawai Berdasarkan Pendidikan	7

DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1 Komposisi pegawai berdasarkan jumlah pendidikan	6
Tabel 3. 1 Pengukuran Indikator Kinerja Kegiatan	13
Tabel 3. 2 Analisis SMART	18
Tabel 3. 3 Indikator Kinerja Kegiatan Balai Teknik Perkeretaapian Kelas II Palembang	21
Tabel 3. 4 Matriks perbandingan antara target Revisi Perjanjian Kinerja 2 Tahun 2025 dan target Perjanjian	23
Tabel 3. 5 Rencana kegiatan penganggaran Perjanjian Kinerja 2026	26
Tabel 3. 6 Alokasi Anggaran Per Jenis Kegiatan Balai Teknik Perkeretaapian Kelas II Palembang per Januari 2026	28
Tabel 3. 7 Alokasi Anggaran Per Jenis Belanja Balai Teknik Perkeretaapian Kelas II Palembang.....	29

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Rencana Kinerja Balai Teknik Perkeretaapian Kelas II Palembang Tahun Anggaran 2026 merupakan perjanjian terhadap rencana pencapaian dari program kerja Tahun 2026. Dokumen ini disusun sebagai upaya optimalisasi pencapaian kinerja dengan memperhatikan perkembangan pelaksanaan program dan kegiatan, serta mempertimbangkan dinamika kebijakan, ketersediaan sumber daya, dan kebutuhan aktual di lapangan.

Penyusunan dokumen ini dimaksudkan untuk memastikan bahwa setiap program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2026 berjalan secara teratur, efektif, dan akuntabel. Dalam dokumen Rencana Kinerja ini, termuat penyesuaian terhadap indikator kinerja kegiatan (Key Performance Indicators) beserta target yang ingin dicapai selama tahun berjalan.

Sebagai bagian dari upaya implementasi Rencana Strategis Direktorat Jenderal Perkeretaapian dan Kementerian Perhubungan, penyusunan Rencana Kinerja ini mengacu pada visi Presiden Republik Indonesia Tahun 2025–2029, yaitu:

"Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045."

Arah kebijakan dan sasaran strategis tersebut juga sejalan dengan Rencana Kegiatan Tahunan dan Rencana Strategis Direktorat Jenderal Perkeretaapian Tahun 2025–2029, serta mendukung pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2026.

Dengan mempertimbangkan aspek pendanaan, sumber daya manusia, serta waktu pelaksanaan kegiatan, pada Tahun Anggaran 2026 Balai Teknik Perkeretaapian Kelas II Palembang menetapkan pelaksanaan satu program utama, yaitu Program Pengelolaan dan Penyelenggaraan Transportasi Perkeretaapian.

Melalui program tersebut, diharapkan Perjanjian Kinerja Tahun 2026 ini dapat menjadi acuan pelaksanaan kegiatan yang lebih terarah, serta menjadi instrumen pengendalian dan evaluasi kinerja yang efektif dalam rangka mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik di sektor perkeretaapian.

B. Maksud dan Tujuan

Penyusunan Dokumen Perjanjian Kinerja Tahun Anggaran 2026 ini bertujuan untuk melakukan penetapan target pencapaian sasaran pembangunan sektor perkeretaapian yang menjadi fokus utama Balai Teknik Perkeretaapian Kelas II Palembang selama tahun 2026. Dokumen ini berfungsi sebagai landasan strategis dalam mengarahkan seluruh program dan kegiatan agar sejalan dengan prioritas pembangunan nasional serta kebijakan Direktorat Jenderal Perkeretaapian.

Adapun tujuan utama dari penyusunan dokumen Perjanjian Kinerja ini adalah untuk menetapkan indikator kinerja kegiatan (Key Performance Indicators) yang komprehensif dan realistis. Indikator tersebut akan dijadikan dasar dalam pelaksanaan evaluasi dan pemantauan berkala, baik terhadap proses pelaksanaan maupun realisasi output dari program dan kegiatan yang telah direncanakan. Dengan adanya indikator yang jelas dan terukur, diharapkan seluruh jajaran unit kerja dapat mengoptimalkan peran serta kontribusinya dalam mencapai target kinerja yang telah disepakati bersama.

Selain itu, dokumen ini juga berfungsi sebagai alat komunikasi yang transparan antara Balai Teknik Perkeretaapian Kelas II Palembang dengan pimpinan Direktorat Jenderal Perkeretaapian, guna memastikan keselarasan visi, misi, dan target kinerja yang mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, dan efisien.

C. Kedudukan Tugas dan Fungsi

Balai Teknik Perkeretaapian Kelas II Palembang merupakan unit pelaksana teknis di lingkungan Kementerian Perhubungan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Perkeretaapian. Balai ini dipimpin oleh seorang Kepala Balai. Kedudukan, tugas, dan fungsi Balai Teknik Perkeretaapian Kelas II Palembang diatur dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 36 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Teknik Perkeretaapian, yang mulai berlaku pada tanggal 2 Desember 2022.

Sesuai dengan ketentuan tersebut, Balai Teknik Perkeretaapian Kelas II Palembang memiliki tugas melaksanakan peningkatan, pengembangan, pengelolaan, pemeliharaan, dan pemanfaatan prasarana perkeretaapian, serta pengawasan penyelenggaraan sarana dan keselamatan perkeretaapian.

Dalam rangka melaksanakan tugas tersebut, Balai Teknik Perkeretaapian Kelas II Palembang menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

1. Pelaksanaan peningkatan dan pengembangan prasarana perkeretaapian
2. Pelaksanaan pengelolaan, pemeliharaan, dan pemanfaatan prasarana perkeretaapian;
3. Pelaksanaan pengawasan penyelenggaraan sarana perkeretaapian;
4. Pelaksanaan pengawasan keselamatan perkeretaapian;
5. Pelaksanaan pemantauan kelaikan prasarana dan sarana perkeretaapian;
6. Pelaksanaan pencegahan dan penindakan pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang perkeretaapian;
7. Pelaksanaan analisis dan penanganan kecelakaan perkeretaapian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
8. Pelaksanaan pengelolaan urusan tata usaha, rumah tangga, kepegawaian, keuangan, hukum, serta hubungan masyarakat.

D. Struktur Organisasi

Struktur organisasi Balai Teknik Perkeretaapian Kelas II Palembang terdiri atas unit-unit kerja yang dirancang untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Balai secara efektif dan efisien. Struktur organisasi tersebut meliputi:

1. Subbagian Tata Usaha
2. Seksi Lalu – lintas, Sarana dan Keselamatan;
3. Seksi Prasarana;
4. Kelompok Jabatan Fungsional; dan
5. Satuan Pelayanan

Bagan struktur organisasi Balai teknik perkeretaapian Kelas II Palembang bisa dilihat pada gambar berikut ini:

```
graph TD; K[KEPALA] --- STU[SUBBAGIAN TATA USAHA]; K --- SL[SEKSI LALU LINTAS, SARANA DAN KESELAMATAN PERKERETAAPIAN]; K --- SP[SEKSI PRASARANA PERKERETAAPIAN]; SL -.-> SP1[SATUAN PELAYANAN]; SP -.-> KJF[KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL];
```

The organizational chart of PT Kereta Api Indonesia (KAI) is structured as follows:

- KEPALA** (Head) is at the top level.
- Reporting to the Kepala are:
 - SUBBAGIAN TATA USAHA** (Sub-section for Business Management)
 - SEKSI LALU LINTAS, SARANA DAN KESELAMATAN PERKERETAAPIAN** (Section for Traffic, Facilities, and Railway Safety)
 - SEKSI PRASARANA PERKERETAAPIAN** (Section for Railway Infrastructure)
- Under the **SEKSI LALU LINTAS, SARANA DAN KESELAMATAN PERKERETAAPIAN**, there is a **SATUAN PELAYANAN** (Service Unit), indicated by a dashed border.
- Under the **SEKSI PRASARANA PERKERETAAPIAN**, there is a **KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL** (Functional Job Group), indicated by a grid pattern border.

1. Subbagian Tata Usaha, Kepegawaian, Kerumahtanggaan, dan Kehumasan.
Tugas pokok dan fungsi Subbagian ini meliputi:
 - a. Menyusun bahan pengelolaan administrasi umum dan tata usaha;
 - b. Menyusun bahan pengelolaan urusan kerumahtanggaan, perlengkapan, dan pemeliharaan fasilitas kantor;
 - c. Menyusun bahan pengelolaan administrasi kepegawaian;
 - d. Menyusun bahan pengelolaan anggaran dan keuangan Balai;
 - e. Menyusun bahan pengelolaan urusan hukum dan dokumentasi peraturan
 - f. Menyusun bahan pengelolaan kehumasan dan publikasi informasi kelembagaan;
 - g. Melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan
2. Seksi Lalu Lintas, Sarana, dan Keselamatan Perkeretaapian.
Tugas pokok dan fungsi Seksi Lalu Lintas, Sarana, dan Keselamatan Perkeretaapian meliputi:

- a. Menyusun bahan pengawasan terhadap penyelenggaraan jaringan lalu lintas, dan angkutan kereta api;
 - b. Menyusun bahan pengawasan keselamatan perjalanan dan kelaikan sarana kereta api;
 - c. Menyusun bahan analisis dan penanganan kejadian kecelakaan perkeretaapian
 - d. Menyusun bahan pengawasan pelaksanaan *Public Service Obligation* (PSO) dan angkutan perintis;
 - e. Menyusun bahan pengelolaan data dan informasi perusahaan perkeretaapian
 - f. Menyusun bahan pelaksanaan pencegahan dan penindakan terhadap pelanggaran peraturan perundang-undangan;
 - g. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan ruang lingkup pekerjaannya.
3. Seksi Prasarana Perkeretaapian.
- Tugas pokok dan fungsi Seksi Prasarana Perkeretaapian meliputi:
- a. Melaksanakan penyusunan bahan pengawasan pembangunan dan peningkatan jalur serta bangunan kereta api;
 - b. Menyusun bahan pengawasan pembangunan dan peningkatan fasilitas operasi kereta api;
 - c. Melakukan penyusunan bahan analisis terhadap kelaikan prasarana perkeretaapian;
 - d. Melaksanakan pengawasan pelaksanaan perawatan (Infrastructure Maintenance Operation (IMO) dan penggunaan prasarana kereta api;
 - e. Menyusun bahan pengelolaan dan pembaruan data Barang Milik Negara (BMN) di bidang prasarana;
 - f. Menyusun bahan pemrosesan data dan laporan kegiatan pengawasan prasarana perkeretaapian;
 - g. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai bidang tugasnya.

4. Kelompok Jabatan Fungsional.

Tugas pokok dan fungsi Jabatan Fungsional meliputi:

- a. Memberikan pelayanan teknis profesional sesuai bidang keahlian dan keterampilan masing-masing;
- b. Melaksanakan kegiatan pengawasan pemantauan dan evaluasi teknis sesuai standar kompetensi jabatan;
- c. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya sesuai arahan pimpinan dan lingkup tanggung jawab jabatan fungsional.

5. Satuan Pelayanan

Satpel bertugas melaksanakan sebagian tugas peningkatan, pengembangan, pengelolaan, pemeliharaan, dan pemanfaatan prasarana perkeretaapian, serta pengawasan penyelenggaraan sarana perkeretaapian dan keselamatan perkeretaapian.

Satuan Pelayanan di wilayah kerja Balai Teknik Perkeretaapian Kelas II Palembang meliputi:

- a. Satuan Pelayanan Tanjung Karang (Lampung);
- b. Satuan Pelayanan Prabumulih;
- c. Satuan Pelayanan Lahat.

E. Sumber Daya Manusia

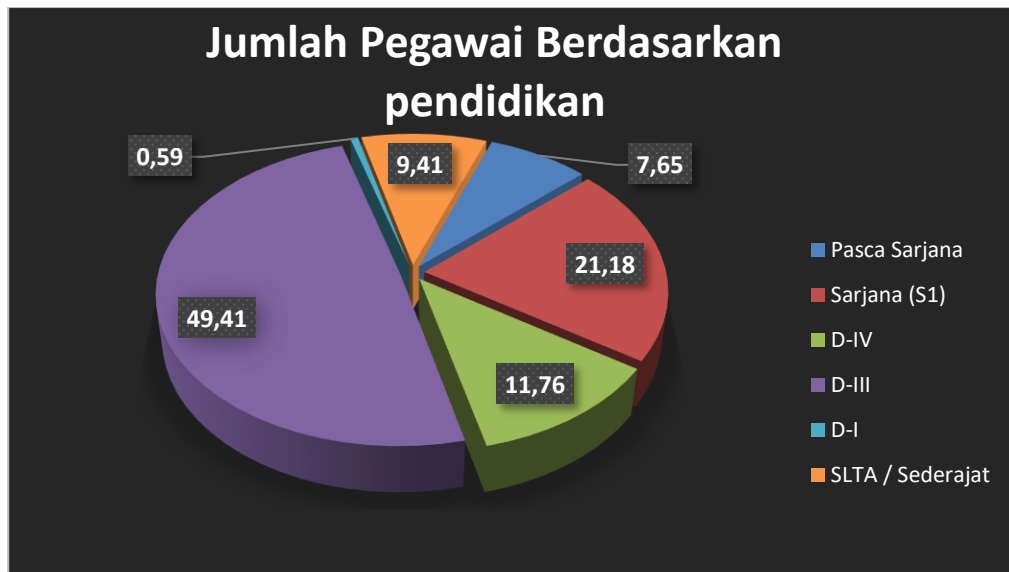
1. Komposisi Pegawai berdasarkan Pendidikan:

Pegawai atau karyawan Balai Teknik Perkeretaapian Kelas II Palembang per Januari pada Tahun 2026 berjumlah 170 Orang yang terdiri dari 92 (Sembilan Puluh Dua) orang status PNS, 37 (Tiga Puluh Tujuh) orang status CPNS, 37 (Tiga Puluh Tujuh) orang status PPPK dan 4 (Empat) orang status PPPK Paruh Waktu.

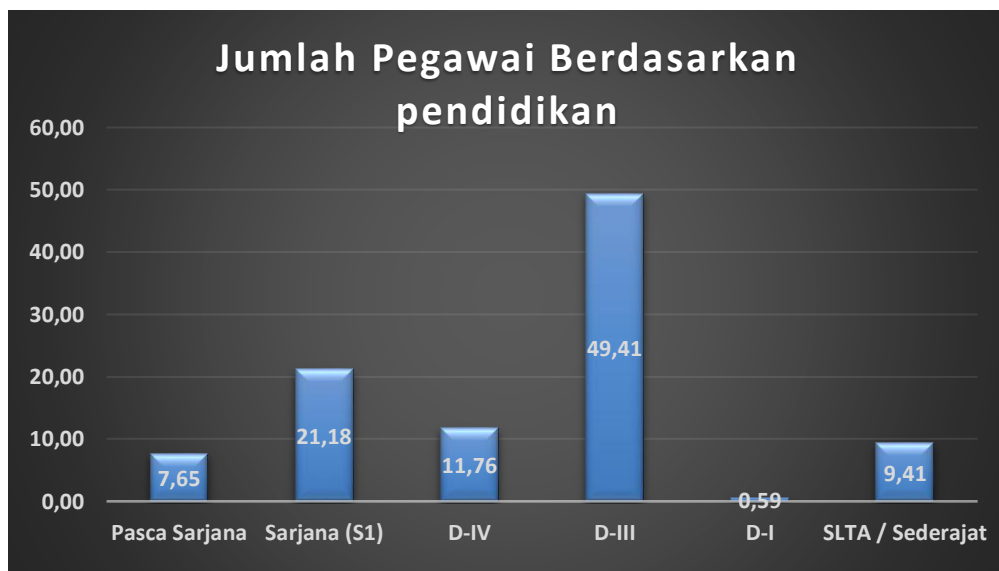
Adapun komposisi pegawai Balai Teknik Perkeretaapian Kelas II Palembang berdasarkan tingkat Pendidikan sampai dengan bulan Januari 2026 adalah sebagai berikut:

Tabel 1. 1 Komposisi pegawai berdasarkan jumlah pendidikan

No	Uraian	Jumlah Pegawai	Komposisi (%)
1	Pasca Sarjana	13	7,65
2	Sarjana (S1)	36	21,18
3	D-IV	20	11,76
4	D-III	84	49,41
5	D-I	1	0,59
6	SLTA / Sederajat	16	9,41
	Jumlah	170	100,00



Gambar 1. 2 Jumlah Pegawai Berdasarkan Pendidikan



Gambar 1. 3 Jumlah Pegawai Berdasarkan Pendidikan

Berdasarkan jumlah dan komposisi Sumber Daya Manusia (SDM) yang dimiliki, pencapaian kinerja kegiatan di lingkungan Balai Teknik Perkeretaapian Kelas II Palembang dilaksanakan dengan menjadikan SDM sebagai komponen input utama dalam setiap proses pelaksanaan kegiatan SDM tidak hanya berperan sebagai pelaksana tetapi juga merupakan faktor kunci dalam mendukung tercapainya output kegiatan yang telah direncanakan.

Seluruh kegiatan yang dilaksanakan merupakan penjabaran langsung dari tugas pokok dan fungsi (tupoksi) masing-masing Seksi dan Subbagian di lingkungan Balai Teknik Perkeretaapian Kelas II Palembang. Tugas dan fungsi tersebut menjadi dasar dalam penyusunan Kontrak Kinerja individu bagi seluruh pegawai baik yang menduduki jabatan struktural fungsional umum, maupun

fungsional tertentu. Hal ini merupakan bagian dari upaya penguatan komitmen terhadap pelaksanaan kinerja individu yang selaras dengan target kinerja organisasi.

Dengan pengelolaan kinerja berbasis tupoksi dan penguatan peran individu melalui Kontrak Kinerja, diharapkan seluruh pegawai memiliki arah dan tanggung jawab yang jelas dalam mendukung pencapaian sasaran strategis Balai Teknik Perkeretaapian Kelas II Palembang secara optimal dan akuntabel.

BAB II

RENCANA STRATEGIS

A. Visi, Misi, dan Tujuan Direktorat Jenderal Perkeretaapian

1. Visi

Sesuai dengan Rencana Induk Perkeretaapian Nasional (RIPNAS) 2020-2030 dan dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan perkeretaapian nasional sebagaimana diamanatkan dan Undang - undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian beserta perubahannya serta regulasi turunan terbaru, maka visi Direktorat Jenderal Perkeretaapian adalah:

Maka kata kunci dalam visi tetap relevan sebagai berikut:

- a. Handal: kualitas pelayanan kereta api yang aman nyaman tepat waktu, dengan kapasitas dan konektivitas yang memadai didukung sarana prasarana terpelihara;
- b. Berdaya Saing: efisiensi dan profesionalisme penyelenggaraan yang mampu bersaing sehat dengan moda lain, didukung SDM dan industri yang kompeten;
- c. Berintegrasi: sistem layanan kereta api yang terhubung dengan moda lain secara intermoda/multimoda selaras dengan tata ruang wilayah;
- d. Berteknologi: penerapan teknologi modern yang relevan dan berkelanjutan;
- e. Bersinergi dengan Industri: optimalisasi kerjasama dan penggunaan produk/jasa industri dalam negeri;
- f. Terjangkau: pelayanan yang adil dan dapat diakses oleh seluruh masyarakat di seluruh wilayah NKRI;
- g. Memberikan nilai tambah: manfaat maksimal untuk pembangunan nasional dari berbagai aspek;
- h. Berkelanjutan: layanan berkelanjutan berdasarkan prinsip investasi yang sehat;
- i. Ketahanan Nasional: mendukung keamanan dan ketahanan nasional terhadap berbagai ancaman.

2. Misi

Misi Direktorat Jenderal Perkeretaapian merupakan pernyataan strategis yang merangkum berbagai upaya yang dilakukan dalam rangka mencapai visi yang telah ditetapkan. Upaya tersebut tidak hanya terbatas pada peningkatan

penyediaan dan kualitas pelayanan transportasi perkeretaapian tetapi juga mencakup penguatan prana pendukung penyelenggaraan perkeretaapian guna mewujudkan sistem perkeretaapian nasional yang andal, maju, modern, terbuka, serta adaptif terhadap perkembangan dan tantangan zaman.

Seluruh upaya tersebut dilaksanakan dalam kerangka pelaksanaan tugas dan fungsi Direktorat Jenderal Perkeretaapian sebagaimana diatur dalam:

- a. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang perkeretaapian yang memberikan kewenangan kepada Pemerintah (dalam hal ini Direktorat Jenderal Perkeretaapian) sebagai pembina penyelenggaraan perkeretaapian nasional untuk mengatur, mengendalikan, dan mengawasi seluruh kegiatan yang dilakukan oleh berbagai pihak terkait;
- b. Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 4 Tahun 2025 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan

Selaras dengan misi Kementerian Perhubungan dan dalam rangka pelaksanaan Rencana Strategis Direktorat Jenderal Perkeretaapian Tahun 2025-2029, maka misi Direktorat Jenderal Perkeretaapian dirumuskan sebagai berikut:

- a. Meningkatkan aksesibilitas Masyarakat terhadap pelayanan jasa transportasi kereta api guna mendukung pengembangan konektivitas antarwilayah;
- b. Meningkatkan keselamatan dan keamanan penyelenggaraan transportasi kereta api;
- c. Meningkatkan kinerja pelayanan jasa transportasi kereta api agar semakin efisien, handal, dan tepat waktu;
- d. Meningkatkan kapasitas sarana dan prasarana pelayanan transportasi kereta api dalam rangka menunjang pertumbuhan permintaan dan mobilitas Masyarakat;
- e. Memperkuat fungsi regulator dalam perumusan kebijakan dan mendorong peran badan usaha dalam penyelenggaraan perkeretaapian nasional; serta
- f. Melaksanakan restrukturisasi dan reformasi di bidang peraturan, kelembagaan, dan sumber daya manusia guna meningkatkan efektivitas tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik di sektor perkeretaapian.

B. Tujuan dan Sasaran

Rumusan mengenai tujuan dan sasaran dari program penyelenggaraan perkeretaapian yang dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Perkeretaapian dalam periode Renstra Tahun 2025-2029 disampaikan sebagai representasi indikasi pencapaian visi Direktorat Jenderal Perkeretaapian, berikut dengan pemenuhan kondisi dan persyaratannya.

1. Tujuan dan Sasaran Balai Teknik Perkeretaapian Kelas II Palembang

a. Tujuan

Penyelenggaraan Perkeretaapian di area kerja Balai Teknik Kelas II Palembang diselenggarakan dengan tujuan untuk bersinergi dalam meningkatkan aksesibilitas transportasi kereta api baik meliputi penyelenggaraan sarana, prasarana, operasi dan keselamatan perkeretaapian.

b. Sasaran

Sasaran penyelenggaraan perkeretaapian tidak terlepas dari konteks regulasi, tantangan, dan permasalahan sektoral, nasional, maupun global yang akan dihadapi. Dengan mengacu Rencana Strategis Ditjen Perkeretaapian tahun 2025 - 2029, maka sasaran Balai Teknik Perkeretaapian Kelas II Palembang tahun 2025 – 2029 sebagai berikut:

- 1) **Sasaran Pertama**, Meningkatnya KONEKTIVITAS Prasarana Perkeretaapian di wilayah Balai Teknik Perkeretaapian Kelas II Palembang melalui sasaran strategis peningkatan pembangunan jalur KA agar menambah konektivitas prasarana perkeretaapian di wilayah kerja Balai Teknik Perkeretaapian Kelas II Palembang;
- 2) **Sasaran Kedua**, Meningkatnya KAPASITAS PRASARANA Mendukung Pelayanan Perkeretaapian di Wilayah Balai Teknik Perkeretaapian Kelas II Palembang;
- 3) **Sasaran Ketiga**, Meningkatnya KINERJA PELAYANAN Lalu Lintas dan Angkutan KA di wilayah Balai Teknik Perkeretaapian Kelas II Palembang;
- 4) **Sasaran Keempat**, Meningkatnya KESELAMATAN Transportasi KA di wilayah Balai Teknik Perkeretaapian Kelas II Palembang;
- 5) **Sasaran Kelima**, Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan di lingkungan Balai Teknik Perkeretaapian Kelas II Palembang.

C. Program

Program Balai Teknik Perkeretaapian Kelas II Palembang Adalah Program Pengelolaan dan Penyelenggaraan Transportasi Perkeretaapian dengan rincian bidang sebagai berikut:

1. Pembangunan dan Pengelolaan Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api;
2. Pembangunan dan Pengelolaan Bidang Prasarana dan Fasilitas Pendukung Kereta Api;
3. Pembangunan dan Pengelolaan bidang Sarana Perkeretaapian;
4. Pembangunan dan Pengelolaan bidang Keselamatan Perkeretaapian;
5. Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Perkeretaapian.

BAB III RENCANA

A. Pengukuran Indikator Kinerja

Tabel 3. 1 Pengukuran Indikator Kinerja Kegiatan

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TATA CARA PERHITUNGAN
1.	Meningkatnya Konektivitas Perkeretaapian di Wilayah Balai Teknik Perkeretaapian	Rasio Konektivitas Transportasi Perkeretaapian Wilayah Balai Teknik Perkeretaapian	<p>Rasio Konektivitas Transportasi Perkeretaapian merupakan perbandingan antara jumlah PKN/PKW/Simpul Transportasi (Bandara, Pelabuhan, Terminal Tipe A)/Kawasan Strategis Nasional/Kawasan Strategis lainnya yang terhubung infrastruktur perkeretaapian di wilayah BTP s.d Tahun Berjalan dibandingkan dengan Rencana Jumlah PKN/PKW/Simpul Transportasi (Bandara, Pelabuhan, Terminal Tipe A)/ Kawasan Strategis Nasional/Kawasan Strategis lainnya yang Terhubung dengan infrastruktur perkeretaapiansesuai RIPNAS Tahun 2030 dikalikan dengan faktor pemanfaatan infrastruktur perkeretaapian di wilayah BTP.</p> <p>Keterangan :</p> <p>Faktor pemanfaatan infrastruktur perkeretaapian merupakan perbandingan realisasi perjalanan kereta api baik penumpang maupun barang terhadap program perjalanan kereta api yang ditetapkan pada Grafik Perjalanan Kereta Api di wilayah BTP</p> $\text{Rasio Konektivitas Infrastruktur Perkeretaapian (RK}_{ip}) = \frac{\text{Jumlah PKN/PKW/Simpul Transportasi (Bandara, Pelabuhan, Terminal Tipe A)/Kawasan Strategis Nasional/Kawasan Strategis lainnya yang terhubung Infrastruktur KA di wilayah BTP s.d Tahun Berjalan}}{\text{Rencana Jumlah PKN/PKW/Simpul Transportasi (Bandara, Pelabuhan, Terminal Tipe A)/ Kawasan Strategis Nasional/Kawasan Strategis Lainnya yang Terhubung dengan Infrastruktur KA di wilayah BTP sesuai RIPNAS Tahun 2030}} \times \text{Faktor Pemanfaatan Infrastruktur KA di wilayah BTP}$
2.	Meningkatnya Kapasitas Prasarana Mendukung Pelayanan Perkeretaapian di Wilayah Balai	Kondisi Jalur KA Sesuai Standar TQI Kategori 1 dan 2 di Wilayah Balai Teknik Perkeretaapian Kelas II Palembang (%)	<p>Panjang jalur kereta api yang telah diukur menggunakan kereta ukur di wilayah BTP dengan hasil Kategori I dan II (kecepatan > 80 km/jam) per periode dibandingkan dengan total panjang jalur KA di wilayah BTP pada tahun berjalan</p> $\text{Persentase Pengoperasian Jalur KA yang Sesuai dengan TQI Kategori I dan II di wilayah BTP} = \frac{\text{Panjang Jalur KA yang Telah Diukur di Wilayah BTP dengan Hasil TQI Kategori I dan II pada Tahun Berjalan}}{\text{Total Panjang Jalur KA di Wilayah BTP pada Tahun Berjalan}} \times 100\%$

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TATA CARA PERHITUNGAN
	Teknik Perkeretaapian	Jalur KA yang Menggunakan Persinyalan Elektrik di Wilayah Balai Teknik Perkeretaapian Kelas II Palembang (%)	<p>Jumlah unit interlocking fasilitas operasi di wilayah RTP yang berbasis elektrik s.d tahun berjalan dibandingkan dengan total jumlah unit interlocking fasilitas operasi eksisting di wilayah RTP pada tahun berjalan dan rencana pembangunan/pengembangan s.d Tahun 2029.</p> $\text{Persentase Fasilitas Operasi dengan Teknologi Handal di Wilayah Balai Teknik Perkeretaapian (\%)} = \frac{\text{Jumlah Unit Interlocking Fasilitas Operasi di wilayah RTP yang berbasis Elektrik s.d Tahun Berjalan}}{\text{Jumlah Unit Interlocking Fasilitas Operasi Eksisting di wilayah RTP pada Tahun Berjalan dan Rencana Pembangunan/Pengembangan s.d Tahun 2023}} \times 100\%$
3	Meningkatnya Kinerja Pelayanan Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api di Wilayah Balai Teknik Perkeretaapian	Persentase Pemenuhan Target Angkutan Kereta Api di Wilayah Balai Teknik Perkeretaapian	<p>Penjumlahan antara pemenuhan target angkutan kereta api penumpang dan pemenuhan target angkutan kereta api barang di wilayah RTP periode 2025-2029 sesuai dokumen Rencana Strategis Ditjen Perkeretaapian dengan bobot masing-masing 50%.</p> $\text{Persentase Pemenuhan Target Angkutan KA di Wilayah RTP} = \frac{\text{Persentase Pemenuhan Target Angkutan KA Penumpang di Wilayah RTP}}{\text{Persentase Pemenuhan Target Angkutan KA}} + \frac{\text{Persentase Pemenuhan Target Angkutan KA Barang di Wilayah RTP}}{\text{Persentase Pemenuhan Target Angkutan KA}}$ <p>Pemenuhan target angkutan penumpang diperoleh dari jumlah realisasi angkutan penumpang kereta api pada Tahun 2025 s.d Tahun berjalan dibandingkan dengan target angkutan penumpang kereta api s.d Tahun 2029 sesuai dokumen Rencana Strategis Ditjen Perkeretaapian.</p> $\text{Persentase Pemenuhan Target Angkutan Penumpang di Wilayah RTP} = \frac{\text{Jumlah Realisasi Angkutan Penumpang Kereta Api di Wilayah RTP dari Tahun 2020 s.d Tahun Berjalan}}{\text{Target Angkutan Penumpang Kereta Api di Wilayah RTP Periode 2020-2024 sesuai Dokumen Renstra}} \times 50\%$ <p>Pemenuhan target angkutan barang diperoleh dari jumlah realisasi angkutan barang kereta api pada Tahun 2025 s.d Tahun berjalan dibandingkan dengan target angkutan barang kereta api s.d 2029 sesuai dokumen Rencana Strategis Ditjen</p> $\text{Persentase Pemenuhan Target Angkutan Barang di Wilayah RTP} = \frac{\text{Jumlah Realisasi Angkutan Barang Kereta Api di Wilayah RTP dari Tahun 2020 s.d Tahun Berjalan}}{\text{Target Angkutan Barang Kereta Api di Wilayah RTP Periode 2020-2024 sesuai Dokumen Renstra}} \times 50\%$

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TATA CARA PERHITUNGAN
		Persentase Penurunan Kejadian Gangguan Operasional Perjalanan Kereta Api pada Perlintasan Sebidang	<p>Pemenuhan target angkutan barang diperoleh dari jumlah realisasi angkutan barang kereta api pada Tahun 2025 s.d Tahun berjalan dibandingkan dengan target angkutan barang kereta api s.d 2029 sesuai dokumen Rencana Strategis Ditjen Perkeretaapian.</p> $\frac{\text{Persentase Penurunan Kejadian Gangguan Operasional Perjalanan Kereta Api pada Perlintasan Sebidang}}{\text{Baseline Rata-Rata Jumlah kejadian gangguan operasional pada periode sebelumnya (2020-2024)}} = \frac{\text{Jumlah kejadian gangguan pada tahun berjalan}}{\text{Baseline Rata-Rata Jumlah kejadian gangguan operasional pada periode sebelumnya (2020-2024)}} \times 100\%$
4.	Meningkatnya Keselamatan Transportasi Perkeretaapian di wilayah Balai Teknik Perkeretaapian	Tingkat Keselamatan Transportasi Perkeretaapian di Wilayah Balai Teknik Perkeretaapian (%)	<p>Tingkat keselamatan transportasi perkeretaapian diperoleh dari selisih nilai maksimal tingkat keselamatan (100%) dengan persentase jumlah kejadian kecelakaan kereta api (anjlokkan, terguling, tabrakan KA dengan KA dan lain-lain/terbakar) di wilayah BTP pada tahun berjalan dibandingkan dengan jumlah keberangkatan kereta api di wilayah BTP pada tahun berjalan</p> $\text{Tingkat Keselamatan Transportasi Perkeretaapian di Wilayah BTP} = \left[1 - \frac{\text{Jumlah Kejadian Kecelakaan KA di Wilayah BTP pada Tahun Berjalan} \times 1.000}{\text{Jumlah Keberangkatan Kereta Api di Wilayah BTP pada Tahun Berjalan}} \right] \times 100\%$
5.	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Balai Teknik Perkeretaapian	Nilai Kinerja Anggaran Balai Teknik Perkeretaapian (Nilai)	<p>Nilai Kinerja Anggaran (NKA) Balai Teknik Perkeretaapian (skala 0-100) mengacu pada PMK Nomor 62 Tahun 2023 dengan perhitungannya merupakan penjumlahan dari 50% (lima puluh persen) dari nilai kinerja atas perencanaan anggaran dan 50% (lima puluh persen) dari nilai kinerja atas pelaksanaan anggaran, yang nilainya dapat diperoleh pada Dashboard Aplikasi Monev Kemenkeu . Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran berupa NKA dikelompokkan pada kategori:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Lebih dari 90 : Kategori Sangat Baik; • 80 - 90 : Kategori Baik; • 60 - 80 : Kategori Cukup; • 50 - 60 : Kategori Kurang; • Kurang dari 50 : Kategori Sangat Kurang. <p>NKA= (Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran x 50%) + (Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran x 50%)</p>

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TATA CARA PERHITUNGAN																		
		Nilai AKIP Balai Teknik Perkeretaapian (Nilai)	Nilai AKIP Balai Teknik Perkeretaapian (Nilai skala 1-100) diperoleh berdasarkan hasil evaluasi implementasi penyelenggaraan SAKIP yang dilaksanakan oleh Inspektorat Jenderal/Tim Evaluasi Internal Eselon I mengacu KM 74 Tahun 2024. Nilai AKIP Balai Teknik Perkeretaapian = <i>(Nilai Perencanaan x 30%) + (Nilai Pengukuran x 30%) + (Nilai Pelaporan x15%) + (Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal x 25%)</i>																		
		Tingkat Penerapan Manajemen Risiko Balai Teknik Perkeretaapian (Nilai)	Penilaian Tingkat Manajemen Risiko Level 1-5 mengacu pada Peraturan Itjen Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Pedoman Penilaian Manajemen Risiko Dalam Mendukung Pengawasan Internal Berbasis Risiko Di Lingkungan Kementerian Perhubungan. Total Skor MR = Total P1 + Total P2 + Total P3 + Total P4 + Total P5 + Total P6 + Total P7 + Total P8 + Total P9 + Total P10 + Total P11 P12 + Total P13 + Total P14 + Total P15 $\Sigma \text{Total per Parameter} = \frac{\text{Jumlah hasil pengukuran}}{\text{Jumlah Teknik pengumpulan data}}$ Keterangan : P = Parameter penilaian tingkat manajemen resiko, dimana setiap penilaian parameter terdiri dari nilai 0, 1 dan 2 <table><tr><th>Total Skor MR</th><th>Level</th><th>Kondisi MR</th></tr><tr><td>0 – 7</td><td>Initial</td><td>Belum ada MR Formal</td></tr><tr><td>8 – 14</td><td>Repeatable</td><td>Partial (Scattered SIs), Belum memadai</td></tr><tr><td>15 – 20</td><td>Defined</td><td>Strategi dan kebijakan MR telah dikomunikasikan, implementasi MR kurang integrative</td></tr><tr><td>21 – 25</td><td>Managed</td><td>MR telah dikomunikasikan dan diimplementasikan, namun masih ada kelemahan dalam implementasi</td></tr><tr><td>26 – 30</td><td>Optimised</td><td>Organisasi telah mengintegrasikan MR, Pengendalian Internal, dan Tata Kelola dengan baik.</td></tr></table>	Total Skor MR	Level	Kondisi MR	0 – 7	Initial	Belum ada MR Formal	8 – 14	Repeatable	Partial (Scattered SIs), Belum memadai	15 – 20	Defined	Strategi dan kebijakan MR telah dikomunikasikan, implementasi MR kurang integrative	21 – 25	Managed	MR telah dikomunikasikan dan diimplementasikan, namun masih ada kelemahan dalam implementasi	26 – 30	Optimised	Organisasi telah mengintegrasikan MR, Pengendalian Internal, dan Tata Kelola dengan baik.
Total Skor MR	Level	Kondisi MR																			
0 – 7	Initial	Belum ada MR Formal																			
8 – 14	Repeatable	Partial (Scattered SIs), Belum memadai																			
15 – 20	Defined	Strategi dan kebijakan MR telah dikomunikasikan, implementasi MR kurang integrative																			
21 – 25	Managed	MR telah dikomunikasikan dan diimplementasikan, namun masih ada kelemahan dalam implementasi																			
26 – 30	Optimised	Organisasi telah mengintegrasikan MR, Pengendalian Internal, dan Tata Kelola dengan baik.																			
		Nilai Pengawasan Kearsipan Internal Balai Teknik Perkeretaapian	Nilai Pengawasan Kearsipan Internal diperoleh Keputusan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 92 Tahun 2021 tentang Instrumen Pengawasan atas Pelaksanaan Penyelenggaraan Kearsipan Pelaksanaan pengawasan dilakukan pada 2 unit penilaian yakni Unit Pengolah (UP) dan Unit Kearsipan (UK) dan penilaian dilakukan pada 2 aspek penilaian dengan bobot pada masing-masing unit sebagai berikut: <ul style="list-style-type: none">• Unit Pengolah (UP) o Aspek Pengelolaan Arsip Dinamis(bobot 70%) o Aspek Sumber Daya Kearsipan (bobot 30%)• Unit Kearsipan (UK) o Aspek Pengelolaan Arsip Dinamis (bobot 60%) o Aspek Sumber Daya Kearsipan (bobot 40%) Nilai Pengawasan Kearsipan Internal Setditjen Perkeretaapian = $\frac{\text{Nilai Unit Pengolah Kearsipan} + \text{Nilai Unit Kearsipan}}{2} \times 100\%$																		

Analisis Smart Indikator Kinerja:

SMART Adalah akronim yang digunakan untuk menetapkan tujuan atau indikator kinerja agar lebih terarah dan terukur. SMART terdiri dari lima kriteria:

S - Spesifik:

Tujuan atau indikator harus jelas dan tidak ambigu menjawab pertanyaan apa yang ingin dicapai, siapa yang terlibat, Dimana, dan mengapa hal tersebut penting.

M – Terukur (Measurable):

Harus ada ukuran atau indikator yang memungkinkan kita mengetahui sejauh mana pencapaian yang telah diraih, biasanya melibatkan angka persentase atau ukuran kuantitatif lainnya.

A – Dapat dicapai (Achievable/Attainable):

Tujuan harus realistis dan bisa dicapai dengan sumber daya dan waktu yang tersedia. Tidak terlalu mudah tapi juga tidak mustahil.

R – Relevan:

Tujuan harus sesuai dan mendukung sasaran yang lebih besar seperti visi misi organisasi rencana strategis atau arah kebijakan.

T – Terbatas Waktu (Time-bound):

Harus memiliki tenggat waktu atau jangka waktu pencapaian yang jelas agar bisa dievaluasi dan dikendalikan.

Tabel 3. 2 Analisis SMART

No	Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	Satuan	Target 2026	Spesifik (S)	Measurable (M)	Achievable (A)	Relevan (R)	Time-bound (T)
1	Rasio Konektivitas Transportasi Perkeretaapian Wilayah BTP	Rasio	0,710	Fokus pada keterhubungan simpul transportasi seperti PKN, PKW, pelabuhan, bandara, terminal tipe A, kawasan industri, dengan jaringan & layanan KA dan faktor pemanfaatan infrastruktur perkeretaapian di wilayah BTP.	Dihitung: (Jumlah simpul terhubung s.d. tahun berjalan ÷ jumlah target simpul konektivitas dalam RIPNAS 2030) × faktor pemanfaatan infrastruktur perkeretaapian di wilayah BTP	Rasio ini ditetapkan sesuai kemampuan aktualisasi proyek infrastruktur konektivitas KA yang berjalan progresif	Mendukung program integrasi moda transportasi nasional & RPJMN bidang konektivitas	Target tahunan dengan progres tahunan menuju capaian maksimal RIPNAS 2030
2	Kondisi Jalur KA Sesuai Standar TQI Katergori 1 dan 2 di Wilayah Balai Teknik Perkeretaapian	%	97,110	Mengukur jalur KA yang memenuhi kriteria kecepatan operasi minimum (Kategori I dan II = >80 km/jam) di wilayah BTP	Rumus: (Panjang jalur hasil pengukuran TQI Kategori I & II ÷ total panjang jalur KA wilayah BTP) × 100%	Pencapaian target bisa didorong melalui pengukuran berkala dan program perbaikan kondisi jalur	Berkontribusi pada peningkatan kualitas dan keandalan pelayanan prasarana KA	Diperbaharui setiap tahun berdasarkan hasil pengukuran TQI aktual
3	Jalur KA yang Menggunakan Persinyalan Elektrik di Wilayah Balai Teknik Perkeretaapian	%	36,144	Mengukur fasilitas operasi (interlocking system) berbasis teknologi elektrik di wilayah kerja	Rumus: (Jumlah unit interlocking elektrik ÷ total unit eksisting & rencana pengembangan) × 100%	Target realistis dicapai melalui pembangunan baru atau modernisasi peralatan eksisting	Mendukung sistem persinyalan & kendali operasi KA yang lebih aman dan efisien	Penilaian tahunan terhadap jumlah fasilitas yang telah terbangun dan aktif

No	Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	Satuan	Target 2026	Spesifik (S)	Measurable (M)	Achievable (A)	Relevan (R)	Time-bound (T)
4	Persentase Pemenuhan Target Angkutan KA	%	37,665	Mengukur realisasi layanan angkutan penumpang dan barang KA di wilayah BTP terhadap target dalam Renstra 2025–2029	Rumus: (50% × pemenuhan angkutan penumpang) + (50% × pemenuhan angkutan barang) dengan pembobotan 1:1	Angka capaian dihitung secara kumulatif dan realistis untuk dicapai secara bertahap	Mendukung pelayanan publik dan logistik nasional sebagai bagian dari fungsi BTP	Evaluasi dilakukan tiap akhir tahun berdasarkan data realisasi dan target Renstra
5	Persentase Penurunan Kejadian Gangguan Operasional di Perlintasan Sebidang	%	20,000	Menilai efektivitas upaya pengurangan kejadian gangguan operasional perjalanan KA di titik-titik perlintasan sebidang	Rumus: ((Base line rata2 kejadian periode sebelumnya (2020-2024) – jumlah kejadian pada tahun berjalan) ÷ Base line rata2 kejadian periode sebelumnya (2020-2024)) × 100%	Bisa dicapai melalui strategi penutupan, penjagaan, pemasangan barrier, dan edukasi masyarakat	Sangat relevan dalam menekan risiko kecelakaan & gangguan pelayanan	Penilaian tahunan dibanding baseline awal tahun rencana
6	Tingkat Keselamatan Transportasi Perkeretaapian di Wilayah BTP	%	100,000	Mengukur rasio kecelakaan perjalanan KA terhadap jumlah keberangkatan KA, sebagai indikator zero accident	Rumus: (1 - (Jumlah kejadian × 1000) ÷ jumlah keberangkatan)) × 100%	Capaian 100% mencerminkan zero accident; bisa diraih melalui mitigasi teknis & operasional	Mewujudkan salah satu prinsip utama pelayanan transportasi, yaitu keselamatan	Diukur per tahun, digunakan untuk penilaian kinerja dan evaluasi risiko
7	Nilai Kinerja Anggaran Balai Teknik Perkeretaapian	Nilai	81,000	Mengukur kualitas perencanaan & pelaksanaan anggaran BTP sesuai PMK 62/2023	Rumus: Skor hasil kombinasi: 50% nilai perencanaan + 50% nilai pelaksanaan dari dashboard Kemenkeu	Realistis dicapai jika perencanaan dan realisasi anggaran sesuai target dan output	Relevan untuk mencerminkan efisiensi, efektivitas, dan akuntabilitas penggunaan anggaran negara	Dinilai setiap tahun oleh sistem Kementerian Keuangan (SMART/Monev Kemenkeu)

No	Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	Satuan	Target 2026	Spesifik (S)	Measurable (M)	Achievable (A)	Relevan (R)	Time-bound (T)
8	Nilai AKIP Balai Teknik Perkeretaapian	Nilai (1–100)	81,900	Menunjukkan tingkat akuntabilitas kinerja instansi berdasarkan evaluasi sistem SAKIP	Rumus: (30%×nilai perencanaan)+(30%×nilai Pengukuran)+(15%×nilai pelaporan)+(25%×Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal)	Target ini dapat dicapai dengan penguatan dokumen perencanaan, pelaporan, serta budaya kinerja	Relevan sebagai bagian dari Reformasi Birokrasi dan peningkatan akuntabilitas	Dinilai setiap tahun melalui sistem e-SAKIP atau instrumen Kemenpan-RB
9	Tingkat Penerapan Manajemen Risiko	Nilai	15,000	Mencerminkan seberapa matang penerapan manajemen risiko dalam tata kelola instansi	Rumus: Jumlah hasil pengukuran ÷ jumlah Teknik pengumpulan data	Bisa diraih melalui pembentukan tim risiko, peta risiko, serta dokumentasi mitigasi	Penting untuk menjamin keberlangsungan organisasi dan pengendalian intern	Penilaian tahunan sebagai bagian dari SPIP dan monitoring internal
10	Nilai Pengawasan Kearsipan Internal	Nilai	73,155	Menilai kesesuaian tata kelola arsip dengan Instrumen ANRI No. 92 Tahun 2021	Rumus: ((nilai UP + nilai UK) ÷ 2) × 100%	Target cukup realistis dicapai dengan peningkatan SDM dan sistem klasifikasi arsip	Penting untuk menjamin keamanan, keberlanjutan dan akuntabilitas dokumen negara	Evaluasi dilakukan setiap tahun oleh ANRI atau evaluator internal

B. Target Perjanjian Kinerja Balai Teknik Perkeretaapian Kelas II Palembang

Sasaran yang ingin dicapai oleh Balai Teknik Perkeretaapian Kelas II Palembang merupakan penjabaran dari Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagaimana tercantum dalam Laporan Antara Rencana Strategis (Renstra) Direktorat Jenderal Perkeretaapian Tahun 2025–2029. Sasaran tersebut selaras dengan tugas pokok Balai Teknik Perkeretaapian Kelas II Palembang sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 36 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Teknik Perkeretaapian.

Indikator Kinerja Kegiatan yang dilaksanakan Balai Teknik Perkeretaapian Kelas II Palembang pada tahun 2026 adalah sebagai berikut:

Tabel 3. 3 Indikator Kinerja Kegiatan Balai Teknik Perkeretaapian Kelas II Palembang

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN		SATUAN	TARGET
1	SK1 Meningkatnya Konektivitas Perkeretaapian di Wilayah Balai Teknik Perkeretaapian Kelas II Palembang	IK1	Rasio Konektivitas Transportasi Perkeretaapian Wilayah Balai Teknik Perkeretaapian Kelas II Palembang	Rasio	0,710
2	SK2 Meningkatnya Kapasitas Prasarana Mendukung Pelayanan Perkeretaapian di Wilayah Balai Teknik Perkeretaapian	IK2	Kondisi Jalur KA Sesuai Standar TQI Katergori 1 dan 2 di Wilayah Balai Teknik Perkeretaapian Kelas II Palembang	%	97,110
		IK3	Jalur KA yang Menggunakan Persinyalan Elektrik di Wilayah Balai Teknik Perkeretaapian Kelas II Palembang	%	36,144
3	SK3 Meningkatnya Kinerja Pelayanan Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api di Wilayah Balai Teknik Perkeretaapian Kelas II Palembang	IK4	Persentase Pemenuhan Target Angkutan Kereta Api di Wilayah Balai Teknik Perkeretaapian	%	37,665
		IK5	Persentase Penurunan Kejadian Gangguan Operasional Perjalanan Kereta Api pada Perlintasan Sebidang	%	20,000

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN		SATUAN	TARGET
4	SK4 Meningkatnya Keselamatan Transportasi Perkeretaapian di wilayah Balai Teknik Perkeretaapian Kelas II Palembang	IK6	Tingkat Keselamatan Transportasi Perkeretaapian di Wilayah Balai Teknik Perkeretaapian Kelas II Palembang	%	100,000
5	SK5 Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Balai Teknik Perkeretaapian Kelas II Palembang	IK7	Nilai Kinerja Anggaran Balai Teknik Perkeretaapian	Nilai	81,000
		IK8	Nilai AKIP Balai Teknik Perkeretaapian	Nilai	81,900
		IK9	Tingkat Penerapan Manajemen Risiko Balai Teknik Perkeretaapian	Nilai	15,000
		IK10	Nilai Pengawasan Kearsipan Internal Balai Teknik Perkeretaapian	Nilai	73,155

Tabel 3. 4 Matriks perbandingan antara target Revisi Perjanjian Kinerja 2 Tahun 2025 dan target Perjanjian

Kinerja Tahun 2026

No	Sasaran Kegiatan 2026	Indikator Kinerja Kegiatan 2026		Satuan	Target Revisi PK II 2025	Target 2026	Keterangan
1	SK1 Meningkatnya Konektivitas Perkeretaapian di Wilayah Balai Teknik Perkeretaapian Kelas II Palembang	IK1	Rasio Konektivitas Transportasi Perkeretaapian Wilayah Balai Teknik Perkeretaapian Kelas II Palembang	Rasio	0,710	0,710	Target Tahun 2026 Sebesar 0,71
2	SK2 Meningkatnya Kapasitas Prasarana Mendukung Pelayanan Perkeretaapian di Wilayah Balai Teknik Perkeretaapian	IK2	Kondisi Jalur KA Sesuai Standar TQI Katergori 1 dan 2 di Wilayah Balai Teknik Perkeretaapian Kelas II Palembang	%	93,030	97,110	Target Tahun 2026 Sebesar 97,11 berdasarkan Realisasi Tahun 2025 (Hasil pengukuran periode III Tahun 2025)
		IK3	Jalur KA yang Menggunakan Persinyalan Elektrik di Wilayah Balai Teknik Perkeretaapian Kelas II Palembang	%	33,730	36,144	Target Tahun 2026 penambahan persinyalan elektrik pada Stasiun Lahat dan Stasiun Merapi
3	SK3 Meningkatnya Kinerja Pelayanan Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api di Wilayah	IK4	Persentase Pemenuhan Target Angkutan Kereta Api di Wilayah Balai Teknik Perkeretaapian Kelas II Palembang	%	18,465	37,665	Target Tahun 2026 sebesar 37,66% (Angk Pnp sebesar 2.237.271 dan Angk Barang Sebesar 58.636.153 ton)

No	Sasaran Kegiatan 2026	Indikator Kinerja Kegiatan 2026		Satuan	Target Revisi PK II 2025	Target 2026	Keterangan
	Balai Teknik Perkeretaapian Kelas II Palembang	IK5	Persentase Penurunan Kejadian Gangguan Operasional Perjalanan Kereta Api pada Perlintasan Sebidang	%	10,000	20,000	Target Tahun 2026 sebesar 20% adalah persentase penurunan kumulatif dari tahun 2025
4	SK4 Meningkatnya Keselamatan Transportasi Perkeretaapian di wilayah Balai Teknik Perkeretaapian Kelas II Palembang	IK6	Tingkat Keselamatan Transportasi Perkeretaapian di Wilayah Balai Teknik Perkeretaapian Kelas II Palembang	%	100,000	100,000	Target Tahun 2026 sebesar 100%
5	SK5 Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Balai Teknik Perkeretaapian Kelas II Palembang	IK7	Nilai Kinerja Anggaran Balai Teknik Perkeretaapian Kelas II Palembang	Nilai	81,000	81,000	Target Tahun 2026 sebesar 81,000
		IK8	Nilai AKIP Balai Teknik Perkeretaapian Kelas II Palembang	Nilai	81,900	81,900	Target Tahun 2026 sebesar 81,900
		IK9	Tingkat Penerapan Manajemen Risiko Balai Teknik Perkeretaapian Kelas II Palembang	Nilai	15,000	15,000	Target Tahun 2026 sebesar 15,000

No	Sasaran Kegiatan 2026	Indikator Kinerja Kegiatan 2026		Satuan	Target Revisi PK II 2025	Target 2026	Keterangan
		IK10	Nilai Pengawasan Kearsipan Internal Balai Perkeretaapian Kelas II Palembang	Nilai	67,000	73,155	Target Tahun 2026 sebesar 73,155 berdasarkan realisasi tahun 2025

C. Alokasi Anggaran Balai Teknik Perkeretaapian Kelas II Palembang Tahun 2026

Rencana kegiatan penganggaran untuk kegiatan yang dilaksanakan Balai Teknik Perkeretaapian Kelas II Palembang pada tahun 2026 berdasarkan Adalah sebagai berikut:

Tabel 3. 5 Rencana kegiatan penganggaran Perjanjian Kinerja 2026

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN		TARGET	SATUAN	ANGGARAN
1	SK1 Meningkatnya KONEKTIVITAS Prasarana Perkeretaapian di wilayah Balai Teknik Perkeretaapian Kelas II Palembang	IK1	Rasio Konektivitas di wilayah Balai Teknik Perkeretaapian Kelas II Palembang	0,710	Rasio	4.750.000.000
2	SK2 Meningkatnya KAPASITAS PRASARANA Mendukung Pelayanan Perkeretaapian di wilayah Balai Teknik Perkeretaapian Kelas II Palembang	IK2	Kondisi Jalur KA Sesuai Standar TQI Katergori 1 dan 2 di Wilayah Balai Teknik Perkeretaapian Kelas II Palembang	93,030	%	4.280.319.000
		IK3	Jalur KA yang Menggunakan Persinyalan Elektrik di Wilayah Balai Teknik Perkeretaapian Kelas II Palembang	33,730	%	307.035.136.000
3	SK3 Meningkatnya KINERJA PELAYANAN Lalu Lintas dan Angkutan KA di wilayah Balai Teknik Perkeretaapian Kelas II Palembang	IK4	Persentase Pemenuhan Target Angkutan Kereta Api di Wilayah Balai Teknik Perkeretaapian	18,465	%	613.852.000
		IK5	Persentase Penurunan Kejadian Gangguan Operasional Perjalanan Kereta Api pada Perlintasan Sebidang di Wilayah Balai Teknik Perkeretaapian Kelas II Palembang	10,000	%	2.744.852.000

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN		TARGET	SATUAN	ANGGARAN
4	SK4 Meningkatnya KESELAMATAN Transportasi KA di Wilayah Balai Teknik Perkeretaapian di wilayah Balai Teknik Perkeretaapian Kelas II Palembang	IK6	Tingkat Keselamatan Transportasi Perkeretaapian di Wilayah Balai Teknik Perkeretaapian Kelas II Palembang	100,000	%	665.705.000
5	SK5 Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Balai Teknik Perkeretaapian Kelas II Palembang	IK7	Nilai Kinerja Anggaran Balai Teknik Perkeretaapian Kelas II Palembang	81,000	%	23.734.230.000
		IK8	Nilai AKIP Balai Teknik Perkeretaapian Kelas II Palembang	81,900	Nilai	612.171.000
		IK9	Tingkat Penerapan Manajemen Risiko Balai Teknik Perkeretaapian Kelas II Palembang	15,000	Nilai	158.319.000
		IK10	Nilai Pengawasan Kearsipan Internal Balai Teknik Perkeretaapian Kelas II Palembang	67,000	Nilai	86.089.000

Tabel 3. 6 Alokasi Anggaran Per Jenis Kegiatan Balai Teknik Perkeretaapian Kelas II Palembang per Januari 2026

No	Jenis Kegiatan	Anggaran
1	Pelayanan Transportasi Perkeretaapian	79.734.027.000
2	Keselamatan dan Keamanan Transportasi Perkeretaapian	233.843.447.000
5	Pengelolaan Organisasi dan SDM Transportasi Perkeretaapian	1.495.767.000
6	Pengelolaan Perencanaan, Keuangan, BMN dan Umum Transportasi Perkeretaapian	29.342.382.000
7	Pengelolaan Sistem Informasi dan Teknologi Transportasi Perkeretaapian	265.050.000
Total		344.680.673.000

Tabel 3. 7 Alokasi Anggaran Per Jenis Belanja Balai Teknik Perkeretaapian Kelas II Palembang

No	Jenis Belanja	Anggaran
1	Belanja Pegawai	9.176.250.000
2	Belanja Barang	245.878.412.000
3	Belanja Modal	89.626.011.000
	Total	344.680.673.000

BAB IV

PENUTUP

Perjanjian Kinerja ini disusun sebagai tindak lanjut dari proses sinkronisasi data target kinerja antara Sekretariat Direktorat Jenderal, Direktorat Teknis, dan Balai Teknik Perkeretaapian Kelas II Palembang.

Sinkronisasi ini bertujuan untuk memastikan keselarasan antara sasaran strategis tingkat pusat dengan pelaksanaan program dan kegiatan di tingkat unit pelaksana teknis.

Dengan dilaksanakannya Perjanjian Kinerja ini, diharapkan dapat mendorong terwujudnya capaian kinerja Balai Teknik Perkeretaapian Kelas II Palembang secara optimal, sebagai bentuk nyata pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsi sesuai dengan target yang telah ditetapkan.

Lebih lanjut, Perjanjian Kinerja ini selaras dengan visi dan misi Presiden Republik Indonesia yang secara politik diarahkan untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang adil dan makmur.

Dokumen ini sekaligus menjadi instrumen utama dalam menilai tingkat akuntabilitas kinerja Balai Teknik Perkeretaapian Kelas II Palembang pada Tahun 2026, serta menjadi dasar evaluasi terhadap efektivitas pelaksanaan program dan kegiatan dalam rangka mendukung tujuan pembangunan nasional di sektor perkeretaapian.

LAMPIRAN

INDIKATOR KINERJA TAHUN 2026
BALAI TEKNIK PERKERETAAPIAN KELAS II PALEMBANG

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	SATUAN
1	Meningkatnya KONEKTIVITAS Prasarana Perkeretaapian di wilayah Balai Teknik Perkeretaapian kelas II Palembang	Rasio Konektivitas di wilayah Balai Teknik Perkeretaapian Kelas II Palembang	Rasio
2	Meningkatnya KAPASITAS PRASARANA Mendukung Pelayanan Perkeretaapian di Wilayah Balai Teknik Perkeretaapian Kelas II Palembang	Kondisi Jalur KA Sesuai Standar TQI Katergori 1 dan 2 di Wilayah Balai Teknik Perkeretaapian Kelas II Palembang	%
		Jalur KA yang Menggunakan Persinyalan Elektrik di Wilayah Balai Teknik Perkeretaapian Kelas II Palembang	%
3	Meningkatnya KINERJA PELAYANAN Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api di Wilayah Balai Teknik Perkeretaapian Kelas II Palembang	Pemenuhan Target Angkutan Kereta Api di wilayah Kerja Balai Teknik Perkeretaapian Kelas II Palembang	%
		Persentase Penurunan Kejadian Gangguan Operasional Perjalanan Kereta Api pada Perlintasan Sebidang di Wilayah Balai Teknik Perkeretaapian Kelas II Palembang	%
4	Meningkatnya KESELAMATAN Transportasi KA di Wilayah Balai Teknik Perkeretaapian Kelas II Palembang	Persentase Tingkat Keselamatan Trasnportasi Perkeretaapian di Wilayah Balai Teknik Perkeretaapian Kelas II Palembang	%
5	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan di lingkungan Balai Teknik Perkeretaapian Kelas II Palembang	Nilai Kinerja Anggaran Balai Teknik Perkeretaapian Kelas II Palembang	%
		Nilai AKIP Balai Teknik Perkeretaapian Kelas II Palembang	%
		Tingkat Penerapan Manajemen Risiko Balai Teknik Perkeretaapian Kelas II Palembang	Nilai
		Nilai Pengawasan Kearsipan Internal Balai Teknik Perkeretaapian Kelas II Palembang	Nilai

Jakarta, Januari 2026
KEPALA BALAI TEKNIK PERKERETAAPIAN KELAS II
PALEMBANG

CHANDRAWAN ADHIPUTRANTO
Pembina (IV/a)
NIP 197108122005021001

INDIKATOR KINERJA TAHUN 2026
BALAI TEKNIK PERKERETAAPIAN KELAS II PALEMBANG

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	SATUAN	TARGET
1	Meningkatnya KONEKTIVITAS Prasarana Perkeretaapian di wilayah Balai Teknik Perkeretaapian kelas II Palembang	Rasio Konektivitas di wilayah Balai Teknik Perkeretaapian Kelas II Palembang	Rasio	0,71
2	Meningkatnya KAPASITAS PRASARANA Mendukung Pelayanan Perkeretaapian di Wilayah Balai Teknik Perkeretaapian Kelas II Palembang	Kondisi Jalur KA Sesuai Standar TQI Katergori 1 dan 2 di Wilayah Balai Teknik Perkeretaapian Kelas II Palembang	%	97,11
		Jalur KA yang Menggunakan Persinyalan Elektrik di Wilayah Balai Teknik Perkeretaapian Kelas II Palembang	%	36,14
3	Meningkatnya KINERJA PELAYANAN Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api di Wilayah Balai Teknik Perkeretaapian Kelas II Palembang	Pemenuhan Target Angkutan Kereta Api di wilayah Kerja Balai Teknik Perkeretaapian Kelas II Palembang	%	37,66
		Persentase Penurunan Kejadian Gangguan Operasional Perjalanan Kereta Api pada Perlintasan Sebidang	%	20,00
4	Meningkatnya KESELAMATAN Transportasi KA di Wilayah Balai Teknik Perkeretaapian Kelas II Palembang	Persentase Tingkat Keselamatan Trasnportasi Perkeretaapian di Wilayah Balai Teknik Perkeretaapian Kelas II Palembang	%	100,00
5	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan di lingkungan Balai Teknik Perkeretaapian Kelas II Palembang	Nilai Kinerja Anggaran Balai Teknik Perkeretaapian Kelas II Palembang	%	81,00
		Nilai AKIP Balai Teknik Perkeretaapian Kelas II Palembang	%	81,90
		Tingkat Penerapan Manajemen Risiko Balai Teknik Perkeretaapian Kelas II Palembang	Nilai	15,00
		Nilai Pengawasan Kearsipan Internal Balai Teknik Perkeretaapian Kelas II Palembang	Nilai	73,15

Jakarta, Januari 2026
KEPALA BALAI TEKNIK PERKERETAAPIAN KELAS II
PALEMBANG

CHANDRAWAN ADHIPUTRANTO
Pembina (IV/a)
NIP 197108122005021001

LAMPIRAN B
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026
BALAI TEKNIK PERKERETAAPIAN KELAS II PALEMBANG

No	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK)	SATUAN	TARGET
1	Meningkatnya Konektivitas Perkeretaapian di Wilayah Balai Teknik Perkeretaapian Kelas II Palembang	Rasio Konektivitas Transportasi Perkeretaapian Wilayah Balai Teknik Perkeretaapian Kelas II Palembang	Rasio	0,71
2	Meningkatnya Kapasitas Prasarana Mendukung Pelayanan Perkeretaapian di Wilayah Balai Teknik Perkeretaapian Kelas II Palembang	Kondisi Jalur KA Sesuai Standar TQI Kategori 1 dan 2	%	97,11
		Jalur KA yang Menggunakan Persinyalaan Elektrik	%	36,14
3	Meningkatnya Kinerja Pelayanan Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api di Wilayah Balai Teknik Perkeretaapian Kelas II Palembang	Persentase Pemenuhan Target Angkutan Kereta Api di Wilayah Balai Teknik Perkeretaapian Kelas II Palembang	%	37,66
		Persentase Penurunan Kejadian Gangguan Operasional Perjalanan Kereta Api pada Perlintasan Sebidang	%	20,00
4	Meningkatnya Keselamatan Transportasi Perkeretaapian di wilayah Balai Teknik Perkeretaapian Kelas II Palembang	Tingkat Keselamatan Transportasi Perkeretaapian di Wilayah Balai Teknik Perkeretaapian Kelas II Palembang	%	100,00
5	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Balai Teknik Perkeretaapian Kelas II Palembang	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Balai Teknik Perkeretaapian Kelas II Palembang	Nilai	81,90
		Tingkat Penerapan Manajemen Risiko Balai Teknik Perkeretaapian Kelas II Palembang	Nilai	15,00
		Nilai Kinerja Anggaran Balai Teknik Perkeretaapian Kelas II Palembang	Nilai	81,00
		Nilai Pengawasan Kearsipan Internal Balai Teknik Perkeretaapian Kelas II Palembang	Nilai	73,15

PROGRAM DAN KEGIATAN

	ANGGARAN EFEKTIF
1. PROGRAM INFRASTRUKTUR KONEKTIVITAS	Rp. 313.577.474.000
b. Pelayanan Transportasi Perkeretaapian	Rp. 79.734.027.000
c. Keselamatan dan Keamanan Transportasi Perkeretaapian	Rp. 233.843.447.000
2. PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN	Rp. 31.103.199.000
a. Pengelolaan Organisasi dan SDM Transportasi Perkeretaapian	Rp. 1.495.767.000
b. Pengelolaan Perencanaan, Keuangan, BMN dan Umum Transportasi Perkeretaapian	Rp. 29.342.382.000
c. Pengelolaan Sistem Informasi dan Teknologi Transportasi Perkeretaapian	Rp. 265.050.000
TOTAL	Rp. 344.680.673.000

Disetujui,

Jakarta, Januari 2026

DIREKTUR JENDERAL PERKERETAAPIAN

KEPALA BALAI TEKNIK PERKERETAAPIAN
KELAS II PALEMBANG



ALLAN TANDIONO
NIP 198801182025211023



CHANDRAWAN ADHIPUTRANTO
NIP 197108122005021001



REVISI RENCANA AKSI ATAS PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026
BALAI TEKNIK PERKERETAAPIAN KELAS II PALEMBANG

NO	SASARAN KEGIATAN BALAI TEKNIK PERKERTEAAPIAN KELAS II PALEMBANG		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK) BALAI TEKNIK PERKERTEAAPIAN KELAS II PALEMBANG	SATUAN	TARGET	KEGIATAN	RENCANA AKSI												ANGGARAN	PENANGGUNG JAWAB	
							BULAN	BULAN	BULAN	BULAN	BULAN	BULAN	BULAN	BULAN	BULAN	BULAN	BULAN	BULAN			
							1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	
1	SK1	Meningkatnya KONEKTIVITAS Prasarana Perkeretaapian di wilayah Balai Teknik Perkeretaapian Kelas II Palembang	IK1	Rasio	0,71	Pembangunan gedung dan bangunan	0,71	0,71	0,71	0,71	0,71	0,71	0,71	0,71	0,71	0,71	0,71	0,71	4.750.000.000	Kepala Seksi Prasarana Perkeretaapian, Kepala Seksi Lalu Lintas, Sarana, dan Keselamatan Perkeretaapian dan sub Bagian Tata Usaha (Staf di Bagian Perencanaan)	
2	SK2	Meningkatnya KAPASITAS PRASARANA Mendukung Pelayanan Perkeretaapian di wilayah Balai Teknik Perkeretaapian Kelas II Palembang	IK2	%	97,11	Perawatan dan Pengoperasian Prasarana Perkeretaapian (IMO)	97,11	97,11	97,11	97,11	97,11	97,11	97,11	97,11	97,11	97,11	97,11	97,11	4.280.319.000	Kepala Seksi Prasarana Perkeretaapian	
			IK3	%	36,14	Peningkatan persinyalan	33,73	33,73	33,73	33,73	33,73	33,73	33,73	33,73	33,73	36,14	78.884.027.000	Kepala Seksi Prasarana Perkeretaapian			
						Pengoperasian dan Perawatan/rehabilitasi jalur, jembatan, stasiun dan fasilitas operasi kereta api											227.093.128.000				
						Pemantauan dan Evaluasi Prasarana Perkeretaapian													1.057.981.000		
3	SK3	Meningkatnya KINERJA PELAYANAN Lalu Lintas dan Angkutan KA di wilayah Balai Teknik Perkeretaapian Kelas II Palembang	IK4	%	37,66	Pemantauan dan Evaluasi Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api	20,03	21,48	22,94	24,57	26,23	27,87	29,56	31,24	32,87	34,59	36,25	37,66	613.852.000	Kepala Seksi Lalu Lintas, Sarana, dan Keselamatan Perkeretaapian	
			IK5	%	20,00	Penanganan perlintasan sebidang di BTP Kelas II Palembang	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20,00	2.470.000.000	Kepala Seksi Lalu Lintas, Sarana, dan Keselamatan Perkeretaapian			
						Pemantauan/Pengawasan dan Evaluasi Keselamatan Perkeretaapian di Balai Teknik Perkeretaapian Kelas II Palembang											274.852.000				
4	SK4	Meningkatnya KESELAMATAN Transportasi KA di Wilayah Balai Teknik Perkeretaapian di wilayah Balai Teknik Perkeretaapian Kelas II Palembang	IK6	%	100	Kendaraan Bermotor (Perawatan Rescue Car dan Pengadaan Kendaraan Bermotor)	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	267.038.000	Kepala Seksi Lalu Lintas, Sarana, dan Keselamatan Perkeretaapian	
						Pemantauan dan Evaluasi Sarana Perkeretaapian													242.604.000		
						Identifikasi Daerah Rawan Kecelakaan dan Bencana di Balai Teknik Perkeretaapian Kelas II Palembang													104.163.000		
						Pemantauan/Pengawasan dan Evaluasi Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)													51.900.000		
5	SK5	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Balai Teknik Perkeretaapian Kelas II Palembang	IK7	%	81,00	Pengadaan/penertiban lahan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	81,00	850.000.000	Kepala Seksi Prasarana Perkeretaapian, Kepala Seksi Lalu Lintas, Sarana, dan Keselamatan Perkeretaapian dan Kepala sub Bagian Tata Usaha	
						Pelayanan organisasi, tata laksana, dan reformasi birokrasi													1.495.767.000		
						Pelayanan umum, Pelayanan rumah tangga dan perlengkapan (satker)													5.292.579.000		
						Gaji dan Tunjangan													9.176.250.000		
						Operasional dan Pemeliharaan Kantor													3.130.704.000		
						Peralatan fasilitas perkantoran													3.194.380.000		
						Pengelolaan Keuangan													153.000.000		
						Penyusunan Laporan Keuangan													176.500.000		
						Pengadaan Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi													265.050.000		
						Penyusunan Dokumen SAKIP dan Pengelolaan Data Balai Teknik Perkeretaapian Kelas II Palembang													188.000.000		
			IK8	%	81,90	Penyusunan rencana program dan Penyusunan rencana anggaran	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	81,90	151.800.000	Kepala Seksi Prasarana Perkeretaapian, Kepala Seksi Lalu Lintas, Sarana, dan Keselamatan Perkeretaapian dan Kepala sub Bagian Tata Usaha
						Penyusunan dan Pengelolaan Kepegawaian														180.371.000	
						Penyusunan dan Pengelolaan Hukum dan Hubungan Masyarakat														92.000.000	
			IK9	Nilai	15,00	Penyusunan SPIP dan manajemen resiko Balai Teknik Perkeretaapian Kelas II Palembang	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15,00	77.169.000	Kepala Seksi Prasarana Perkeretaapian, Kepala Seksi Lalu Lintas, Sarana, dan Keselamatan Perkeretaapian dan Kepala sub Bagian Tata Usaha
						Penyusunan Manajemen Risiko Balai Teknik Perkeretaapian Kelas II Palembang														81.150.000	
			IK10	Nilai	73,15	Nilai Pengawasan Kearsipan Internal Balai Teknik Perkeretaapian Kelas II Palembang	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	73,15	86.089.000

KEGIATAN	ANGGARAN
Program Infrastruktur Konektivitas	Rp 313.577.474.000
Pelayanan Transportasi Perkeretaapian	Rp 79.734.027.000
Keselamatan dan Keamanan Transportasi Perkeretaapian	Rp 233.843.447.000
Program Dukungan Manajemen	Rp 31.103.199.000
Pengelolaan Organisasi dan SDM Transportasi Perkeretaapian	Rp 1.495.767.000
Pengelolaan Perencanaan, Keuangan, BMN dan Umum Transportasi Perkeretaapian	Rp 29.342.382.000
Pengelolaan Sistem Informasi dan Teknologi Transportasi Perkeretaapian	Rp 265.050.000
TOTAL	Rp 344.680.673.000

Palembang, Januari 2026
KEPALA BALAI TEKNIK PERKERETAAPIAN KELAS II PALEMBANG

CHANDRAWAN ADHIPUTRANTO
NIP 197108122005021001